

## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK

**Fitri**

**Bima Nugraha**

Universitas Palangka Raya

*email: ftri0864@gmail.com, bimangrh18@gmail.com*

### **Abstrak**

Komunikasi Politik merupakan suatu bentuk komunikasi atau interaksi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik maupun aktor politik, kemudian berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi publik dapat di lihat atau di saksikan seperti halnya kegiatan kampanye politik dalam pemilihan umum (pemilu), suatu bentuk persuasif pemilihan, hingga debat calon pemimpin dengan memanfaatkan media massa sebagai alat atau perantaranya. Komunikasi Politik terdiri dari beberapa unsur seperti komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik.

Partai politik sebagai Lembaga publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka atau transparan terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi. Keterbukaan informasi ini menjadi salah satu upaya untuk merealisasikan "good governance" dan mendorong serta menjadikan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam UU KIP no 14 tahun 2008, masyarakat diberi akses dan hak atas suatu informasi yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undang-undang. Kemudian keterbukaan atau transparansi dapat mendorong adanya partisipasi publik.

**Kata Kunci:** *Komunikasi Politik, Komunikasi Publik, Partai Politik, Keterbukaan*

### **Abstract**

*Political communication is a form of communication or interaction in which there are political messages and political actors, then related to power, government, and government policies. Political communication is also related to aspects of public communication that can be seen or witnessed, such as political campaign activities in general elections (elections), a form of persuasive election, to debates on candidate leaders by utilizing mass media as a tool or intermediary. Political communication consists of several elements such as political*

*communicators, political messages, political channel or media, political targets or targets, and the influence or effect of political communication.*

*Political parties as public institutions are required to provide information services in an open or transparent manner to the public who want to access all kinds of information. This information disclosure is one of the efforts to realize "good governance" and encourage and make a democratic government system. In UU KIP no 14 of 2008, the public is given access and rights a information which is a human right and is guaranteed by law. Then openness or transparency can encourage public participation.*

**Keywords:** *Political Commnuciation, Puclic Communication, Political party, Openness*

## PENDAHULUAN

Partai politik secara kelembagaannya masih terdapat ketertutupan atau tidak transparan dalam pengelolaan atau manajemennya, contohnya seperti tidak transparansi dalam hal rekrutmen anggota partai politiknya, munculnya isu-isu "money politic" dalam rangka mengkaderkan anggotanya sebagai pejabat politik, suara dari pemilih bisa dibeli, kualitas anggota yang terpilih dalam parlemen sangat rendah, ideologi atau platform yang diperjuangkan tidak jelas dan banyak faktor lain yang tidak dipahami oleh masyarakat terkait seluk beluk partai politik tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, terdapat Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik atau KIP nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan sebagai badan publik karena menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun dengan adanya Undang-Undang tersebut, tidak mesti menjadikan suatu partai politik menjadi lebih terbuka tentang informasi kepada masyarakat terkait dengan kelembagaannya sebagai partai politik.

Dalam program pembangunan selama ini, ditujukan bagi partai politik yang belum dapat terlepas dari independensi, perjuangan untuk rakyat, konsistensi dengan platform yang sudah dimiliki. Pada Umumnya partai politik saat ini memiliki beban yang berat karena tuntutan masyarakat kepada partai politik sangat tinggi, adanya persaingan yang tidak sehat antara partai politik serta belum mapannya orientasi dari sistem politik. Ada beberapa studi terhadap partai politik dalam pembangunan sistem politik agar lebih sehat mengisyaratkan persoalan mendasar, yaitu : *Pertama*, tidak ada persoalan yang menyangkut peran partai politik dari segi normatif. Peran dan kedudukan partai politik dipandang oleh negara dan pemerintah sebagai hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. *Kedua*, terdapat sosiologis-politis sebagai persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan tersebut menjadi kompleks ketika berhubungan dengan partai politik terkait sosiologis-politis. Di antaranya kepentingan pragmatis partai politik, yang berorientasi pada kekuasaan dan finansial, pengurus partai politik yang memiliki kualitas atau kemampuan yang rendah. tingkat kemandirian yang rendah

terhadap Lembaga partai politik, serta rendahnya peran dan kedudukan partai politik dalam hal sosialisasi, diperlukannya komunikasi dan Pendidikan politik demi menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkualitas.

*Ketiga*, adanya kebijakan kerja antara pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka upaya peningkatan kualitas partai politik yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi salah satu indikator dalam hal proses desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih baik. Dengan kata lain, pemerintah bermaksud memberikan ruang partisipasi secara luas kepada masyarakat dalam pemecahan masalah dalam partai politik di Indonesia secara kolektif. *Keempat*, adanya asumsi kolektif, artinya dalam hal peningkatan kualitas dari partai politik akan memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu peneliti menggunakan metode analisis. Dalam teknik pengambilan data, peneliti menggunakan metode analisis studi literature dengan mencari referensi-referensi, baik melalui buku, artikel dan internet dalam menganalisis fenomena.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi Politik Dalam Komunitas Partai Pada Pemilihan Umum**

Komunikasi politik yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah suatu proses yang akan berlangsung secara berkelanjutan. Komunikasi politik pada pemilu tersebut hanya merupakan proses komunikasi awal yang akan dilanjutkan setelah pemilu selesai. Hal ini merupakan komunikasi tindak lanjut dari hasil komunikasi awal pada pemilu tersebut. Proses komunikasi politik tersebut akan berjalan dengan baik jika melibatkan kelima unsur proses komunikasi. Kelima unsur komunikasi politik khususnya pada pemilihan umum antara lain yaitu meliputi:

1. Pelibat (actor atau partisipan) : Dalam unsur komunikasi politik pelibat dapat berupa perseorangan, maupun kelompok. Di dalam pemilihan umum, komunikasi digunakan oleh semua pelibat atau aktor dengan tujuan menyampaikan suatu pesan politik kepada pihak-pihak tertentu dari semua kalangan, seperti petani, masyarakat yang pengangguran, wiraswasta dan lain-lain. Para aktor yang terlibat langsung dalam pemilihan umum sebagai calon pemimpin seperti Bupati, Gubernur, Walikota atau wakil rakyat lainnya dapat memanfaatkan komunikasi politik, para calon pemimpin tersebut juga mewakili partainya masing-masing dalam pemilihan umum. Berbagai strategi dilakukan oleh aktor dari masing-masing partai untuk menarik perhatian massa agar lebih banyak lagi ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan politik seperti pemilihan umum. Dalam mencalonkan calon pemimpin kesepahaman visi dan misi antara pelibat/aktor dengan kelompok tertentu menjadi sangat penting demikian pula dukungan dari partisipan (masyarakat). Selain itu, para calon tersebut saling berlomba dalam memanfaatkan media massa dan komunikasi untuk melancarkan kegiatan politik. Berbagai media

- komunikasi dan strategi digunakan, berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor atau para calon pemimpin.
2. **Pesan:** Dalam hal berkomunikasi tujuan utamanya adalah untuk memberikan suatu informasi atau pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada orang lain, seperti halnya komunikasi politik. Oleh karena itu, komunikasi politik penting dilakukan agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik. Biasanya dalam komunikasi politik pesan yang ada di dalamnya berisi tentang politik atau berkaitan tentang politik. Sedangkan dalam pemilihan umum lebih kepada pesan untuk kepentingan publik atau masyarakat pada umumnya dan mengandung keadilan secara diologis.
  3. **Saluran (channel):** yang dimaksud dengan saluran di sini adalah berupa media atau alat atau dapat berupa tindakan yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan politik. Media massa dan organisasi merupakan yang paling berpengaruh berkaitan dengan saluran atau channel.
  4. **Kontek :** merupakan situasi komunikasi politik pada komunitas terhadap suatu keadaan dan memiliki kecenderungan yang mana melingkupi proses komunikasi politik.
  5. **Pengaruh (effet) :** Sifat dari komunikasi politik adalah persuasif yang dapat memberikan perubahan pada pendengarnya. Pengaruh komunikasi politik ini bisa membawa pada perubahan yang baik ataupun sebaliknya, atau bahkan bisa jadi lebih buruk.

### **Strategi Komunikasi Politik**

Strategi komunikasi merupakan suatu konsep yang banyak diadopsi, namun dalam komunikasi politik kata "strategi" merujuk pada unsur atau komponen dalam komunikasi yang spesifik berdasarkan konteks keberhasilan dan efektivitas komunikasi. Menurut Thomson (2001) menggambarkan unsur-unsur dari komunikasi : *Pertama*, memiliki visi organisasi atau perspektif yang menjadi acuan dalam mengatur aktivitas komunikasi lebih lanjut. *Kedua*, menetapkan rencana yang berasal dari visi dan misi, perencanaan yang tepat berawal dari seperangkat data dan informasi yang ditemukan dan di dapatkan di lapangan. *Ketiga*, menetapkan taktik, artinya menempuh langkah-langka praktis dengan mempertimbangkan kemampuan internalnya dan situasi atau keadaan lapangan. *Keempat*, menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran. *Kelima*, penyusunan pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi yang dijalankan jelas dan dapat diikuti oleh semua pelaku komunikasi. Dalam Komunikasi politik sangatlah penting, begitu juga informasi atau pesan yang terkandung di dalamnya yang ditujukan kepada publik. Tertutupnya kebebasan akan menjangkau informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti, rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang kemudian berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu, dari segi penyelenggaraan pemerintahan, akan mengakibatkan pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

## **Transparansi dan Hak Informasi**

Keterbukaan akses informasi bagi publik menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja dari pemerintah maupun unit-unit kerja di dalamnya. Di Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi membuka ruang bagi tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dilakukan agar hak-hak warga negara tetap terjaga, dan dengan adanya keterbukaan memperoleh informasi juga dapat menjadikan aktor pertahanan menjadi lebih profesional dan bertindak berdasarkan hukum. Konstitusi (UUD) pada hakikatnya merupakan kontrak sosial dalam kehidupan bernegara. Pasal 28 F pada prinsipnya memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak tersebut selain diatur dalam pasal tersebut, juga jauh sebelumnya sudah ditetapkan PBB melalui resolusi 59 ayat 1 Tahun 1946 dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 19, yang menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional sehingga wajib dilindungi oleh negara. Hak atas informasi meliputi: (1) Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe); (2) Hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (public access to information); (3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (right to participate); (4) Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free and responsible pers); (5) Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan). Selain itu, keterbukaan informasi juga memberikan banyak peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan public yang ada. Rakyat yang well-informed menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan Pengalaman empiris bahwa: (1) Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi; (2) Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah; (3) Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan; (4) Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel; (5) Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia

## **KESIMPULAN**

Komunikasi politik pada suatu komunitas partai merupakan aspek yang sangat penting dalam partai politik untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Proses komunikasi politik yang dilakukan oleh partai selama pemilihan perlu didukung oleh saluran atau media, itu sebabnya ada banyak partai politik dan politisi yang menghabiskan uang mereka untuk membuat iklan politik. Beberapa partai politik mendapatkan beberapa manfaat dari posisi ketua mereka yang juga menjadi pemilik media. Meskipun tayangan media dapat mempengaruhi sikap

politik masyarakat, tetapi karena semakin banyaknya stasiun televisi maka stasiun televisi tidak lagi memiliki dominasi yang begitu kuat. Sekarang penonton sudah memiliki banyak pilihan media, yang berarti bahwa penonton semakin aktif dan selektif. Mereka tidak lagi mudah dipengaruhi hanya oleh satu informasi politik. Dengan kondisi yang ada, di mana banyak muncul televisi baru telah membuat persaingan politik melalui media menjadi ketat.

## References

- A.Y, R. (2020, Juni Minggu). *Politik dan Komunikasi* . Retrieved from Binus University: <https://binus.ac.id/Malang/2020/06/politik-dan-Komunikasi/>
- Atie R, H. E. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Mimbar*, 123-127.
- Elda. (2019). Komunikasi Politik Oleh Komunitas Partai Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia. *Talenta Conference Series*, 20-21.